



DINILAI BISA TEKAN SEBARAN CORONA

DIY Tolak Pemudik, Pemkot: Itu yang Diharapkan

UMBULHARJO (MERAPI)- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sepakat dan mengikuti kebijakan Pemda DIY yang melarang pemudik dari zona merah Covid-19 masuk DIY dengan putar balik di perbatasan. Langkah itu dianggap bisa semakin mengendalikan sebaran Covid-19 di Yogyakarta.

"Kami mengikuti saja kebijakan di tingkat provinsi. Itu yang memang kami harapkan bersama. Kalau kedatangan dari luar itu semakin kecil dan turun, maka sebaran kasus bisa semakin terkendali," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Senin (27/4).

Dia menyatakan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain. Titik cek poin kendaraan dari luar daerah oleh

Dinas Perhubungan DIY tidak berada di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta akan mengikuti saja kebijakan larangan pemudik masuk ke DIY.

"Sebaran Covid-19 di kota relatif terkendali dan masih bisa kami tangani. Kalau melihat trenya masih terkendali. Kasus tujuh yang positif dari tiga keluarga dan 9 PDP. Untuk ODP naik turun karena orang datang ke Yogya," tambahnya.

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta itu, teori transmisi lokal terjadi jika orang dalam pemantauan (ODP) banyak. Sedangkan OPD di Kota Yogyakarta per 26 April tercatat 487 orang dinilai masih kecil dan

***Bersambung ke halaman 9**

DIY

transmisi sebatas di lingkungan keluarga. Selain itu dia mengaku Pemkot Yogyakarta mulai mengendorkan persyaratan Pasien Dalam Pemantauan (PDP).

"Kalau kemarin-kemarin PDP harus ada syarat seperti sesak nafas. Maka sekarang ODP yang berat kami masukkan dalam PDP. Dengan kebijakan orang dari zona merah tidak bisa masuk, harapannya tidak ada tambahan kasus Covid baru di Yogya," terang Heroe.

Jika ada pendatang dari zona merah yang berhasil lolos atau masuk ke Yogyakarta, dia menyampaikan harus tetap menjalani prosedur Covid-19 yakni menjadi Orang Dalam Pemantauan (OPD) dan isolasi selama 14 hari. Termasuk memeriksakan kesehatan. Pihaknya berharap warga yang merantau untuk menunda mudik tahun ini.

"Kami yakin teman-teman yang ada dipantauan paham harus dilakukan kebijakan itu. Yang perlu ditekankan kebijakan ini untuk kebaikan semua dan keluarga. Kalau punya hasrat pulang, ditunda dulu dua bulan lagi. Pemerintah pusat menjanjikan kompensasi libur di luar lebaran, itu bisa digunakan nanti," paparnya.

Pemkot Yogyakarta mencatat per 26 April 2020, jumlah pendatang dan warga pulang dari luar DIY sebanyak 2.316 orang. Rinciannya yakni pendatang sebanyak 1.329 orang dan warga pulang 987 orang.

Sementara itu sebanyak 16 armada pemudik berasal dari berbagai daerah diminta putar balik ke daerah asal saat berusaha masuk Gunungkidul. Senin (27/4). Kendaraan yang mengangkut pemudik tersebut merupakan jenis mobil sebanyak 16 mobil dan dengan

sepeda motor sebanyak 10 motor. "Jumlah pemudik mencapai 79 orang," kata Kasubag Humas Polres Gunungkidul Iptu Eny Nur Widiastuti, kemarin perang.

Dikatakan, puluhan kendaraan pemudik yang diminta putar balik tersebut melewati 7 pos penyekeatan wilayah perbatasan. Di antaranya pos Bedoyo, Ponjong yang merupakan pemudik dari Jawa Timur serta Pos Semin berasal dari Jabodetabek (Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Jumlah kendaraan pemudik yang diminta putar balik di masing-masing pos penyekeatan hampir sama. "Kebijakan tetap kita lakukan terhadap siapapun yang melanggar larangan mudik," imbuhnya.

Dia menambahkan, jumlah pemudik tujuan Kabupaten Gunungkidul menjelang kebijakan penyekeatan masih terjadi dan data sampai Senin (27/4) pagi,

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul mencatat kumulatif jumlah pemudik mencapai 11.253 orang. Artinya dalam sehari kemarin masih ada 225 pemudik dengan menggunakan mobil pribadi. Sebagaimana diketahui Gunungkidul dibangun tujuh posko penyekeatan dalam Operasi Ketupat Progo 2020. Masing-masing sudah mulai dioptimalkan, terdiri Posko Hargo-

dumilah di Kecamatan Patuk, Playen, Panggang, Rongkop, Bedoyo (Ponjong), Blutak (Semin) dan Ngawen dengan mengerahkan sebanyak 445 personel kepolisian.

Semua kendaraan luar kota akan dilakukan pengecekan kemudian akan dilakukan langkah persuasif dan jika melanggar imbauan mudik diminta untuk kembali ke daerah asal mereka.

(Tri/Pur)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005